**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN CEK
KOSONG DI KEOPILISAN DAERAH RIAU**

Oleh : Pramboy H Sitinjak

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH.,M.Kn

Alamat : Perumahan Villa Putri Duyung F8, Pekanbaru

Email : pramboy.sitinjak@yahoo.co.id - Telepon : 082284242442

ABSTRACT

Rapid economic growth and complex spawned various forms of business cooperation, which is increasing day by day. The increasing business cooperation, causing the higher the level of disputes between the parties involved. In the current business cooperation the government's efforts to develop payment traffic that are demand deposits. One of payments that are demand deposits is a check. But in its use checks mischaracterized its use is by issuing a blank check. Dilhat from the perspective of criminal law the issuance of bad checks is included in the criminal fraud. police which is the most important element in the judicial system to perform legal settlement against crime.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on a study in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted at the General Directorate of Criminal Investigation Police of Riau, while the overall population and the sample is related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with interview and literature study.

From the research there are three basic problems that can be inferred. First, the completion of the crime of fraudulent use of a blank check in the Directorate General of Criminal Investigation Police of Riau, has not run optimally. Second, obstacles in the completion of the crime of fraud using a blank check in the Directorate General of Criminal Investigation Riau Regional Police is investigating the lack of the number of members, geographical factors, factors the absence of witnesses. Third, efforts to overcome the obstacles in the completion of the crime of using a blank check at the General Directorate of Investigation Krimainal Riau Regional Police investigators are increasing the number of personnel, in collaboration with relevant institutions, the investigator requested the expert testimony. Suggestions writer, first, the government has set a ban on the withdrawal formerly blank check so that the law is reinstated, but the sanctions should be, Secondly, as the frontline in a legal settlement in Indonesia, the police must be more synergy and further improve coordination with the parties Another and improve quality in dealing with any offenses exist, Third, the public is advised to be more careful in the sale and purchase or other agreement to use checks as a means of payment.

Keywords: settlement of criminal offenses - fraud - police

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.¹ Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sekarang ini sedang berkembang adalah tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, dimana tindak pidana ini juga mulai berkembang di wilayah hukum kepolisian daerah riau.

Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek tersebut dalam cek sejumlah uang yang tertera diatasnya.²

Dilihat dari perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan.

Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Adapun unsur-unsur yang mewakili sebuah tindakan penipuan sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan diantaranya memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.³

Salah satu fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak kriminal yang akhir-akhir ini terjadi. Salah satunya yaitu tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong. Kepolisian sebagai penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Terkait dengan hal tersebut penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong sangat menarik untuk diteliti. Di tahap kepolisian tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong masih terbuka pada 2 (dua) cara penyelesaian. Cara pertama,

¹Ninie Suparni, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007.hlm.1.

² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung: 2009, hlm. 249.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

penyelesaiannya bisa menggunakan aspek hukum perdata. Cara kedua, kasus ini bisa menggunakan prespektif hukum pidana.

Laporan tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong oleh kepolisian daerah riau, yang diselesaikan secara pidana : LP/08/I/2014/SPKT/RIAU, LP/14/I/2014/SPKT/RIAU, LP/30/I/2014/SPKT/RIAU, LP/48/II/2014/SPKT/RIAU, LP/80/II/2014/SPKT/RIAU, LP/111/III/2014/SPKT/RIAU, LP/134/IV/2014/SPKT/RIAU, LP/206/V/2014/SPKT/RIAU, LP/211/VI/2014/SPKT/RIAU, LP/262/VII/2014/SPKT/RIAU, dan laporan tindak pidana penipuan kepolisian yang diselesaikan secara perdata atau berdamai : LP/334/IV/2014/SPKT/RIAU, LP/436/XII/2014/SPKT/RIAU, LP/46/XII/2014/SPKT/RIAU.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul ***“Penyelesaian hukum tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum oleh penyidik Polri dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong yang terjadi di Kepolisian Daerah Riau ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri

dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polri dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong oleh Polri di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong yang ada oleh Polri di Kepolisian Daerah Riau.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini berasal dari WvS hindia belanda (KUHP).

Istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
2. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Dalam buku hukum pidana Moeljanto pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau delik-delik percobaan dan delik-delik penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefenisikan tindak pidana atau perbuatan pidana (*strabaar feit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴
3. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeliatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas hukum pidana.⁵

Unsur-unsur tindak pidana, menurut beberapa teoritis.

- a. Menurut Moeliatno, unsur tindak pidana adalah :
 1. Perbuatan.
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah :
 1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
 2. Yang bertentangan dengan perundang-undangan. Diadakan tindakan penghukuman.
 3. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :
 1. Kelakuan manusia.
 2. Diancam dengan pidana
 3. Dalam peraturan perundang-undangan

Meskipun telah dijelaskan tentang arti perbuatan pidana yang tidak demikian saja sama dengan *strafbaar feit*, namun masih dapat dihadapkan perbedaan cara menentukan isi perumusan perbuatan pidana itu.

Perumusan perbuatan pidana menurut faham para penulis Belanda, diartikan suatu perbuatan yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Sedangkan Prof. Moeliatno merumuskan perbuatan pidana dalam arti suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Rumusan perbuatan pidana yang terakhir ini akan lebih lengkap apabila disusun dengan kalimat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang

⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm.67.

melanggar larangan tersebut. Perumusan dengan mengandung kalimat aturan hukum pidana disitu akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Hal ini berbeda dengan sejarah kehidupan hukum pidana yang berlandaskan atas asas legalitas sebagai hasil protes dan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan dari raja-raja absolut, maka sesudah itu diharuskan pertama-tama untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana dilihat dari dalam rumusan undang-undang (hukum yang tertulis)⁶.

Konsep dari aliran hukum pidana melahirkan ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi atau perorangan.
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah.
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, harus ada kelonggaran atau fleksibilitas dalam sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.⁷

2. Teori penyelesaian sengketa

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum, pemerintah wajib

menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis biasanya seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energy dan sebagainya yang dilakukan adalah melalui proses Litigasi. Dalam proses litigasi para pihak ditempatkan saling berlawanan satu sama lain. Masing-masing pihak berjuang keras untuk menang dan mengalahkan pihak lain.⁸

Dalam perjalanan sejarah panjang proses litigasi mulai dirasan banyak orang cenderung mendatangkan masalah baru karena sifatnya *win-lose*, tidak responsif dan menghabiskan banyak waktu. Hingga pada tahun 1976 Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger memelopori sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kemudian dalam peristilahan kita di Indonesia di kenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bersifat tertutup, kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Jiwa APS ini sebenarnya sudah berakar dalam di tengah masyarakat kita.

Misalnya pada masyarakat *Batak* yang sebenarnya relatif memiliki nilai *litigious*, justeru masih mengandalkan *runggun* adat, yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Demikian juga halnya

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta: 1998. hlm 130.

⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 27.

⁸ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012. hlm. 1-2.

bisa kita temukan di berbagai budaya di Indonesia.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 10 pengertian APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ada 2 (dua) aliran dalam APS, yaitu aliran yang mengatakan Arbitrase terpisah dari APS dan aliran yang mengatakan bahwa Arbitrase termasuk dalam APS. Terkait hal itu pada saat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disahkan dan diundangkan Arbitrase dipisahkan dari APS.¹⁰

Arbitrase adalah berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara kolerasi anatar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologi ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan

penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹²

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum.

3. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau Penyidik dan
2. Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Riau

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara dan kuisioner dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab

⁹ *Ibid.* hlm.14-15

¹⁰ *Ibid.* hlm.16-17

¹¹ *Ibid.* Hlm. 36

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dalam penelitian ini dengan Kasat Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru, tim Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan korban.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di kepolisian daerah riau.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya.¹³ Didalam proses penyelesaian hukum pidana dilakukan mulai dari kepolisian yang merupakan unsur yang paling penting dalam penyelesaian hukum pidana.

Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsitem dari system peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”.¹⁴

Berita tentang tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau bukan saja menarik perhatian tapi mengusik rasa aman dalam bertransaksi atau melakukan jual beli menggunakan cek. Melalui cek transaksi-transaksi pembayaran dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan pembayaran dengan uang tunai.

Disamping mempermudah dalam transaksi pembayaran bisnis dan menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, cek juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan cek atau surat berharga sebagai sarana perbuatannya.

¹³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: 2014, hlm. 15.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media group, Jakarta: 2007, hlm. 48.

Kejahatan-kejahatan dalam berbisnis khususnya dalam transaksi pembayaran menggunakan cek telah menciptakan masalah-masalah bagi tugas penyidik dan penyidik kepolisian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Samuel Butar-Butar yang mana pertanyaan yang diajukan oleh penulis tentang penyelesaian hukum tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong adalah:¹⁵

1. Apabila terhadap pemberian cek kosong tersebut merupakan peristiwa pidana maka penyidik Kepolisian Daerah Riau akan melakukan penyidikan terhadap tersangka. Dalam pemberian cek kosong yang merupakan peristiwa pidana, penyidik harus menemukan bahwa dalam pemberian cek tersebut terpenuhinya unsur penipuan yaitu:
 - a. Terpenuhinya kata bohong yang dilakukan tersangka pemberian cek kosong.
 - b. Terpenuhinya tipu muslihat bahwa cek tersebut dikeluarkan ternyata rekening yang mengeluarkan cek tersebut telah ditutup oleh pihak bank.
 - c. Dapat dibuktikan bahwa terjadi pemalsuan cek berupa tanda tangan.
 - d. Dapat dibuktikan bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan.
2. Apabila temuan penyidik bukan merupakan peristiwa pidana dan peristiwa tersebut terjadi karena adanya hubungan hukum yang bersifat wanprestasi maka dihentikan demi hukum karena merupakan rana perdata dan penyidik Kepolisian Daerah Riau menyarankan kepada para pihak

untuk berdamai dan diselesaikan secara perdata dengan cara menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi, negoisasi, maupun alternatif penyelesaian lainnya.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keterangan kepada penuntut umum tentang apa sebenarnya yang terjadi, tindak pidana apa yang dilakukan dan siapa tersangkanya¹⁶. Penyelesaian hukum terhadap cek kosong di Kepolisian Daerah Riau apabila pemberian cek kosong tersebut merupakan peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan, dalam hal peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut dan kemudian di temukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kompol L simatupang selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang mana penulis mengajukan pertanyaan tentang apa saja upaya yang telah di lakukan pihak kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan menggunakan cek kosong tersebut, yaitu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan korban untuk di mintai keterangan

¹⁵ Wawancara dengan *Brigadir Samuel Butar-Butar*, Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 30 April 2015, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

¹⁶ *Ibid.*

terkait tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.¹⁷

Kegiatan penyidikan yang dilakukan berdasarkan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:¹⁸

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
2. Laporan polisi sebagaimana dimaksud ayat 1 yang diterima sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) atau siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk laporan polisi model A dan laporan polisi model B.
3. Setelah laporan polisi dibuat penyidik/ penyidik pembantu yang bertugas di SKPT atau siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga disebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap yang meliputi :¹⁹

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya paksa
4. Pemeriksaan

5. Gelar perkara
6. Penyelesaian berkas perkara
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
8. Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
9. Penghentian penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan pada suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 109 KUHAP.²⁰ Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan telah selesai (P21).

Untuk lebih jelasnya ada beberapa kasus tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong yang dalam proses penyidikan telah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kompol L. simatupang, Direktru Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Hari kamis 30 April 2015, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

¹⁸ Pasal 14, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁹ Pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

²⁰ <http://www.kompasiana.com/sitim4yam/proses-pemeriksaan, diakses, tanggal 25 juni 2015.>

selesai dan berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada kejaksaan (P21) yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Riau yaitu :

- 1) LP/08/I/2014/SPKT/RIAU
Pelapor : Aditi saputra Jalan swadaya Rt/Rw 007/001 Pekanbaru
Tersangka : Wisdar
Ket : P-21
- 2) LP/30/I/2014/SPKT/RIAU
Pelapor : Endar muda, Jalan bata No.20 Kel.reja sari tenayan raya
Tersangka : Dahlan sinaga
Ket : P-21
- 3) LP/48/II/2014/SPKT/RIAU
Pelapor : Yefri dasriyan, Jalan kakap IV No.69 Pekanbaru
Tersangka : M.yasin
Ket : P-21
- 4) LP/80/II/2014/SPKT/RIAU
Pelapor : Nur adidah, Jalan Rambutan No.55 pekanbaru
Tersangka : Linda irdayani
Ket : P-21
- 5) LP/111/III/2014/SPKT/RIAU
Pelapor : Indra wahyu hidayat, Jalan. Dusun 1 muara jaya
Tersangka : yuimetri
Ket : P-21
- 6) LP/46/XII/2014/SPKT/RIAU
Pelapor : Sabar f , Jalan batin No.83 Pekanbaru
Tersangka : Suyetti
Ket : P-21
- 7) LP/262/VII/2014/SPKT/RIAU
Pelapor : Junaidi, Jalan. Kuantan timur, rengat
Tersangka : alimudin
Ket : P-21

Namu dari jumlah kasus penipuan menggunakan cek kosong di wilayah Kepolisian Daerah Riau ada pula yang hingga saat ini belum selesai dikarenakan pelaku atau tersangka melarikan diri dan belum

ditemukan. ada 3 kasus yang hingga saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Riau yaitu berdasarkan laporan

- 1) LP/14/I/2014/SPKT/RIAU
Korban: Maria
Alamat : jalan. Rajawali No.65,pekanbaru
Tersangkah : -
- 2) LP/134/IV/2014/SPKT/RIAU
Korban : Nofriadi
Alamat : jalan. Batin 33B, pekanbaru
Tersangkah : -
- 3) LP/211/VI/2014/SPKT/RIAU
Korban : suroto
Alamat :jalan. Ahmad dahlan No.153
Tersangkah : -

Dalam laporan LP/334/IV/2014/SPKT/RIA(antara Anna, beralamat : jalan imam munadar no 111, pekanbaru dengan imam satria beralamat jalan :paus No.126), LP/436/XII/2014/SPKT/RIAU (antara Edy saputra, beralamat : desa kota bangun Rt/Rw 002/004, kec.tapung hilir, kampar dengan priyoni, beralamat:jalan tongkol No.13, pekanbaru), dan LP/206/V/2014/SPKT/RIAU (antara andi arief, beralamat jalan siak No.23 dumai timur dengan rahmad saputra beralamat jalan soekarno hatta komplek damai langgeng 23B) yang ditangani oleh Penyidik kepolisian Daerah Riau dalam proses penyidikan dihentikan karena para kedua belah pihak telah berdamai . Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.²¹

B. Hambatan Yang Dialami Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek

²¹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Samuel Butar-Butar, *Loc.cit.*

Kosong Di Kepolisian Daerah Riau.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau belum terlaksana secara maksimal. Penanganan kasus penipuan menggunakan cek kosong di Kepolisian Daerah Riau masih dalam tahap penyidikan dan ada beberapa laporan yang pelakunya belum tertangkap. Alasan tersebut menggambarkan hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyelesaian hukum tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir andre, Adapun hambatan-hambatan sebagai berikut :²²

a. Faktor kurangnya jumlah anggota penyidik di Kepolisian Daerah Riau

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, maka kepolisian dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat. Pada umumnya tenaga penyidik pada Kepolisian Daerah Riau belum memiliki kemampuan yang lebih dalam menangani suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan

menggunakan cek kosong dibutuhkan personil yang seimbang dengan jumlah kasus yang ada, dalam hal ini yang ada tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi sehingga penanganan kasus penipuan menggunakan cek kosong ini belum maksimal, yaitu jumlah kasus tahun 2014 berjumlah 13 kasus sedangkan sumber daya manusia nya dalam hal ini penyidik yang dimiliki hanya 6 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyidik tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada, sehingga hal ini menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

b. Faktor keadaan geografis

Wilayah provinsi riau yang sangat luas dan berbatasan dengan provinsi lain bahkan dengan negara-negara tetangga yang merupakan jalur transportasi antar negara. Hal ini menyebabkan mudahnya tersangka tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong melarikan diri dan menyulitkan Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap tersangka, terutama tersangka yang keluar Wilayah Provinsi Riau. Sesuai dengan hasil wawancara dengan brigadir andre , dari 10 kasus yang berdasarkan hasil temuan penyidik bahwa kasus tersebut merupakan peristiwa pidana 8 diantaranya tersangka penipuan menggunakan cek kosong melarikan diri keluar dari daerah Riau, sehingga sangat sulit pihak kepolisian Daerah Riau melakukan pelacakan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.

c. Saksi-saksi yang tidak ada

Dalam upaya membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, peran saksi-saksi sangat penting. Dalam Kitab Undang-Undang

²² Wawancara dengan *Bapak Brigadir Andre, SH*, Penyidik Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis 30 April 2015, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

Hukum acara Pidana (KUHP) dalam pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andre, selaku penyidik pembantu di Kepolisian Daerah Riau menyebutkan bahwa dalam menyelidiki tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong yang menjadi kendala yang sangat besar yang di alami kepolisian adalah tidak adanya saksi untuk di mintai keterangan karena dalam penerbitan cek hanya dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga membuat kasus tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong sulit diselesaikan.

C. Upaya Yang Di Lakukan Guna Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong Di Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penyelesaian hukum di harapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan baik supaya setiap masyarakat merasa puas akan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di negara ini. Lembaga kepolisian menjadi lembaga yang secara resmi bertanggung jawab atas penegakan hukum baik melalui usaha

pencegahan (preventif) maupun usaha penanggulangan (represif).

Memang setiap usaha yang di lakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakan hukum pastilah mempunyai hambatan-hambatan tersendiri, tak terkecuali hambatan yang di alami oleh kepolisian daerah riau dalam penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, yang kadang kala bisa mengakibatkan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong tidak berjalan dengan efektif.

Namun hambatan-hambatan yang timbul tersebut tidak membuat aparat kepolisian daerah riau patah arang dalam menangani kasus tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di wilayah hukum kepolisian daerah riau, tetapi hal tersebut di jadikan sebagai pemompa semangat guna berbuat yang lebih lagi dalam penyelesaian hukum di wilayah hukum kepolisian daerah riau, karena mereka mengetahui di tangan mereka lah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di pertaruhkan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong maka kepolisian daerah riau melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Penambahan Personil

Penambahan personil menjadi upaya yang mutlak di lakukan oleh kepolisian guna menjamin penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di wilayah kepolisian daerah riau . Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong

di butuhkan personil yang seimbang dengan jumlah kasus yang ada.

Berdasarkan uraian tentang hambatan yang di temui oleh kepolisian daerah riau, maka menurut Bapak kompol L Simatupang perlu penambahan personil dari 6 orang personil menjadi setidaknya 10-15 personil sehingga memudahkan dalam penanganan tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di Provinsi Riau.²³

2. Bekerjasama dengan Instansi-Instansi Terkait

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak kompol L. Simatupang, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum, dalam melakukan penyelidikan dan pengintaian atau bahkan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, pihak kepolisian daerah riau mengadakan kerjasama dengan seluruh kepolisian sektor yang ada dan juga dengan seluruh kepolisian resor yang ada di wilayah provinsi Riau. Dan jika pelaku diduga atau di ketahui berada di luar daerah provinsi Riau maka kepolisian daerah riau akan menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat.²⁴

3. Penyidik meminta keterangan ahli

Berdasarkan wawancara dengan bapak Brigadir Andre, mengatakan bahwa kepolisian daerah riau dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan selalu mendengarkan keterangan saksi karena saksi merupakan salah satu

alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.²⁵

Lebih lanjut Bapak Andre mengatakan jika para saksi tidak ada maka penyidik meminta kepada keterangan ahli. Dalam hal ini keterangan ahli yang lebih memahami mengenai cek tersebut mengingat bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti agar dapat dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa pihak Kepolisian Daerah Riau selalu serius menangani kasus yang datang ke kepolisian tanpa memandang jenis kasus atau banyak tidak rugi yang di timbulkan oleh tindak pidana tersebut.²⁶ Hal tersebut sangat penting karena kepolisian daerah riau sangat antusias dalam menangani dan menindak tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di provinsi riau.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian hukum tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di kepolisian daerah riau yaitu apabila terhadap pemberian cek kosong terjadi peristiwa pidana maka kepolisian daerah riau akan melakukan penyidikan dan apabila temuan penyelidikan bukan merupakan peristiwa pidana melainkan adanya peristiwa wanprestasi maka dihentikan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian Daerah Riau menyarankan kepada para pihak untuk berdamai dan diselesaikan secara perdata yaitu menggunakan

²³ Wawancara dengan *Bapak Kompol L Simatupang, Loc.cit*

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Andre, Loc.cit*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kepolisian dikenal dengan tindakan diskresi, yaitu suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi penyidik kepolisian. Dalam penerbitan cek tersebut terjadi peristiwa pidana kemudian dilakukan penyidikan belum terlaksana dengan maksimal yaitu dikarenakan adanya hambatan yang dialami oleh kepolisian daerah.

2. Dalam penyelesaian hukum tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong oleh kepolisian daerah riau mengalami hambatan-hambatan yang membuat penyelesaian hukum tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong. Hambatan tersebut berupa kurangnya jumlah penyidik dan penyidik pembantu di kepolisian daerah riau, keadaan geografis/jarak provinsi Riau dan saksi-saksi yang tidak ada dalam proses penyelidikan dan penyidik oleh kepolisian daerah Riau.
3. Upaya yang dilakukan di kepolisian daerah riau dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong adalah menambah personil penyidik dan penyidik pembantu, menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pengejaran atau penangkapan tersangka atau pelaku, meminta keterangan ahli guna melengkapi data dan berkas yang diperlukan kepolisian daerah riau.

B. Saran

1. Pemerintah dahulu sudah mengatur tentang larangan penarikan cek kosong yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 dimana sanksi pidana yang dijatuhkan bagi

pelaku penerbit cek kosong dipidana hukum mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara sebanyak-banyak dua puluh tahun dan denda empat kali jumlah yang di tulis dalam cek tersebut. Kepada pemerintah diharapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 diberlakukan kembali namun dengan sanksi pidana yang lebih wajar.

2. Sebagai garda terdepan dalam penyelesaian hukum di Indonesia maka kepolisian harus lebih bersinergi dan lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak lain serta meningkatkan kualitas dalam menangani setiap tindak pidana yang ada, dan kepolisian harus tegas dan bergerak dalam menanggulangi dan menindak para pelaku tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong di wilayah hukum kepolisian daerah riau baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif.
3. Disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam jual beli ataupun perjanjian lainnya yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran dan masyarakat supaya lebih tanggap dan lebih peduli terhadap penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ninie Suparni, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007. hlm. 1.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung: 2009, hlm. 249.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 67.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta: 1998. hlm 130.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 27.

Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012. hlm. 1-2.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas

Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: 2014, hlm. 15.

Barda Nawawi Arief, *masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media group, Jakarta: 2007, hlm. 48.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

Pasal 14, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. Website

<http://www.kompasiana.com/sitim4yam/proses-pemeriksaan>, diakses, tanggal 25 juni 2015.